

UNDANG-UNDANG **SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 2012**

(UU RI No. 11 Tahun 2012)

Dilengkapi dengan

UU No. 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum

PP No. 40 Tahun 2011
tentang Pembinaan, Pendampingan,
dan Pemulihan terhadap Anak yang
Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi

PP No. 83 Tahun 2008
tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pemberian Bantuan Hukum Secara
Cuma-Cuma



SINAR GRAFIKA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	1
Bab I Ketentuan Umum	3
Bab II Diversi	10
Bab III Acara Peradilan Pidana Anak	15
Bab IV Petugas Kemasyarakatan	36
Bab V Pidana dan Tindakan.....	41
Bab VI Pelayanan, Perawatan, Pendidikan, Pembinaan Anak, dan Pembimbingan Klien Anak.....	49
Bab VII Anak Korban dan Anak Saksi	52
Bab VIII Pendidikan dan Pelatihan.....	53
Bab IX Peran Serta Masyarakat.....	54
Bab X Koordinasi, Pemantauan, dan Evaluasi	55
Bab XI Sanksi Administratif.....	56
Bab XII Ketentuan Pidana	56
Bab XIII Ketentuan Peralihan	57
Bab XIV Ketentuan Penutup	59

2.	Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	62
3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	101
	Bab I Ketentuan Umum.....	102
	Bab II Ruang Lingkup.....	104
	Bab III Penyelenggaraan Bantuan Hukum	105
	Bab IV Pemberi Bantuan Hukum	107
	Bab V Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum	109
	Bab VI Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum	110
	Bab VII Pendanaan	111
	Bab VIII Larangan.....	113
	Bab IX Ketentuan Pidana.....	113
	Bab X Ketentuan Peralihan	113
	Bab XI Ketentuan Penutup	114
4.	Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	116
5.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi	124

Bab	I Ketentuan Umum.....	125
Bab	II Pembinaan.....	131
Bab	III Pendampingan.....	134
Bab	IV Pemulihan	136
Bab	V Pengawasan.....	143
Bab	VI Pendanaan	144
Bab	VII Ketentuan Penutup	145
6.	Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi.....	146
7.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma	167
8.	Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma	176